

# LAPORAN PENELITIAN



## PEMERINTAHAN REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA DAN GAGALNYA PENERAPAN SISTEM OTONOMI DAERAH DI SUMATERA BARAT 1956-1961

Oleh

Dra. Eni May, M.Si

JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Undang-undang mengenai desentralisasi atau otonomi daerah telah ada sejak masa orde baru, dengan adanya UU no. 5 tahun 1974 yang memuat pokok-pokok peraturan pemerintah daerah. Akan tetapi, realisasi sistem desentralisasi baru dimulai sejak masa reformasi, dilihat dari banyaknya undang-undang yang berkaitan dengan sistem desentralisasi di Indonesia, seperti UU no. 22 tahun 1999, UU no. 25 Tahun 1999, UU no. 32 Tahun 2004, UU no. 33 Tahun 2004, dan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Diterapkannya sistem desentralisasi membuat pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan memajukan daerahnya masing-masing berdasarkan besarnya APBD daerah tersebut. Satu dekade setelah diperbaharainya UU desentralisasi pada tahun 1999, banyak bermunculan daerah-daerah dengan perekonomian kuat di Indonesia. Sistem desentralisasi tidak disangkal menjadi pemicu hal tersebut.

Penerapan sistem desentralisasi ini pada masa Orde Lama juga menjadi tuntutan masyarakat di daerah. Soekarno yang menjanjikan penerapan sistem desentralisasi di daerah luar Pulau Jawa ternyata tidak kunjung menepati janjinya. Hal ini memicu munculnya aksi protes oleh masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa,

seperti munculnya gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, dan PERMESTA di Sulawesi.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada mulanya bukan suatu gerakan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan ini mengambil wilayah Sumatera Tengah sebagai basis kekuatannya. Beberapa faktor yang melatari munculnya gerakan ini adalah karena<sup>1</sup>;

- a. Terjadinya penciptaan kesatuan militer Sumatera Tengah dari tingkat Divisi menjadi Brigade,
- b. Pengangkatan Ruslan Muljoharjo, seorang birokrat Jawa sebagai Pejabat Gubernur,
- c. Sedikitnya anggaran pembangunan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah,
- d. Semakin besarnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemerintahan republik indonesia
- e. Diberhentikannya beberapa komandan militer daerah dan,
- f. Pecahnya dwitunggal Soekarno-Hatta.

Setelah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, pemerintah pusat telah membuat rancangan untuk membentuk suatu pemerintahan yang menggunakan sistem desentralisasi. Artinya, kekuatan dan kedaulatan politik dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga daerah diberi kebebasan untuk

---

<sup>1</sup> Gusti Asnan, *Kamus Sejarah Minangkabau* (Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau: Gunatama, 2003), hlm. 231-232.

melaksanakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat, sesuai dengan cara dan situasi di daerah mereka.

Desentralisasi merupakan ciri kunci Republik Indonesia, dengan dibuatnya suatu kebijakan desentralisasi pemerintah dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1948. Dalam UU no. 22 tahun 1948 ini dibentuk tiga tingkat otonomi pemerintahan di bawah tingkat nasional; propinsi, kabupaten, dan desa. UU ini juga diperkuat dengan disahkannya pembentukan propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatera pada tahun 1950. Oleh karena itu, pemerintah propinsi, kabupaten, dan desa akan memiliki kekuasaan yang cukup berarti untuk memerintah daerahnya. Pemerintah propinsi, kabupaten, dan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri, termasuk didalamnya urusan pembangunan, perbaikan infrastruktur, pemasaran dan distribusi barang, serta pemanfaatan pemasukan daerah, baik yang berasal dari pertambangan, pertanian, atau kelautan.<sup>2</sup>

Akan tetapi, pemerintah pusat justru menghambat terwujudnya cita-cita desentralisasi tersebut, dengan cara hanya menunjuk secara *ad hoc* dan sementara saja badan-badan dan perwakilan daerah, tanpa adanya pemilihan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah di daerah, dan semakin menjadi-jadi pada tahun 1956, ketika badan perwakilan sementara tersebut juga dibubarkan, dan menunda pemilihan badan perwakilan yang telah dijanjikan tersebut sebagai penggantinya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> J.D. Legge, *Cultural Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration 1950-1960* (Ithaca: Cornell University Press, 1961), hlm. 29-30.

<sup>3</sup> Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 255-256.

Sesudah pembentukan negara kesatuan pada bulan Agustus 1950, pemerintah pusat mulai menunjukkan bahwa mereka tidak lagi berniat untuk mewujudkan sistem desentralisasi bagi daerah-daerah di Sumatera. Hal ini disebabkan karena beberapa daerah yang masih dibawah kekuasaan Belanda hampir saja terlepas dari NKRI. Diterapkannya sistem desentralisasi dikhawatirkan akan memicu daerah tersebut akan terlepas dari pemerintah pusat. Padahal, dua daerah yang menjadi sumber dana pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan di pulau Jawa, yaitu Aceh dan Sumatera Barat merupakan daerah yang paling loyal selama masa revolusi. Upaya ketidak berpihakkan pemerintah pusat untuk membuktikan janji desentralisasinya menunjukkan bahwa daerah di Sumatera adalah daerah yang kurang bisa dipercaya oleh pemerintah Pusat. Hal ini juga menjadi faktor pendorong ketidaksenangan orang-orang di daerah kepada pemerintah pusat, karena daerah di Sumatera seperti sengaja dikesampingkan dan otonomi untuk mereka ditolak dengan tegas.

Masih di tahun yang sama, 1950, pemerintah pusat menyusun kembali Divisi Banteng menjadi Brigade EE Banteng, dan pada tanggal 1 November 1950 brigade ini digabungkan ke dalam Tentara Territorial I (TT I), yang bermarkas pusat di Medan. Pada April 1952, Brigade Banteng dibubarkan menjadi Resimen IV dari Komando Sumatera Utara. Resimen ini dipimpin oleh Ahmad Husein.<sup>4</sup> Selama ia memimpin Resimen IV tersebut ia telah berkali-kali menyampaikan keluhan ke pemerintah pusat

---

<sup>4</sup> Ahmad Husein adalah salah satu dari perwira hasil didikan Jepang. Ia memimpin Divisi Banteng selama perlawanan dengan Belanda. Dia memimpin kesatuan di Solok yang bertanggung jawab terhadap front timur yang berbatasan dengan Padang yang diduduki Belanda. Batalio. Yang ia pimpin diberi nama Harimau Kuranji. Ia memperoleh pangkat Letnan Kolonel pada tahun 1949. *Ibid*, 277-278.

mengenai kondisi dan keadaan hidup prajurit di Sumatera Barat. Bahkan bersama Gubernur Roeslan ia memimpin delegasi ke Jakarta untuk memprotes keadaan tersebut. Delegasi tersebut disetujui oleh Gubernur setelah Ahmad Husein mengajaknya mengunjungi barak-barak tentara di Padang, Teluk Bayur, Solok, dan Padang Panjang pada Agustus 1956. Pada kunjungan ini Roeslan melihat bahwa permasalahan yang dihadapi tentara diantaranya, keadaan tempat tinggal yang buruk, pelayanan kesehatan yang minim, anak-anak menderita karena banyaknya penyakit dan kematian.<sup>5</sup> Akan tetapi, tidak ada upaya perbaikan oleh pemerintah pusat setelah kunjungan delegasi ke Jakarta itu.

Munculnya ide untuk melakukan aksi protes kepada pemerintah pusat adalah setelah terjadinya pertemuan mantan perwira aktif Divisi Banteng. Reuni ini diadakan pada tanggal 24 November 1956, dan dihadiri oleh 612 veteran Divisi Banteng, yang menandatangani suatu kesepakatan yang disebut Piagam Banteng. Isi dari Piagam Banteng ini terdiri dari empat tuntutan utama yaitu<sup>6</sup>,

- a. Tuntutan penyelesaian masalah pertahanan daerah.
- b. Tuntutan penyelesaian masalah sosial ekonomi rakyat daerah.
- c. Tuntutan melakukan perbaikan yang cepat dan progresif di segala bidang, terutama dalam kepemimpinan Angkatan Darat dan mengaktifkan kembali Divisi Banteng.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, 278.

<sup>6</sup>Makmum Salim, *Sedjarah Operasi-Operasi gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA* (Jakarta: Departemen Pertahanan-Kelompok Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hlm. 2-4.

- d. Tuntutan untuk melaksanakan otonomi luas dalam bentuk dan isi, dan penghapusan sistem pemerintahan Indonesia yang terpusat atau sentralistik yang menyebabkan sistem birokrasi yang tidak sehat, kemacetan pembangunan di daerah, dan hilangnya inisiatif daerah.

Selain membentuk Piagam Banteng, reuni ini juga membentuk Dewan Banteng yang bertugas menjalankan Piagam Banteng. Dewan ini terdiri dari 17 orang, yang terdiri dari 8 perwira aktif dan pensiun, 2 anggota polisi, dan 7 orang dari sipil, ulama, pimpinan politik, dan pejabat. Tuntutan dalam Piagam Banteng ini ditolak sama sekali oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat Dewan Banteng mempunyai rencana untuk mengambil tindakan. Hingga pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini menjadi pendorong terakhir Dewan Banteng untuk mengambil tindakan. Hingga pada tanggal 20 Desember 1956, Gubernur Roeslan Moeljoarjo menyerahkan kekuasaan Sumatera Tengah kepada Ahmad Husein.<sup>7</sup> Gerakan di Sumatera Tengah ini kemudian menjadi pemicu bagi pergolakan di daerah yang dipimpin oleh perwira-periwira Angkatan Darat yang tidak puas dengan pemerintah pusat.

Selain adanya ketidakpuasan dalam tubuh militer, permasalahan sesungguhnya yang memicu terjadinya gerakan PRRI adalah permasalahan keberatan daerah Sumatera Tengah karena banyak penghasilan ekspor mereka disalurkan ke pemerintah pusat di Jawa, sedangkan daerah tidak memperoleh keuntungan untuk menikmati hasil daerah mereka. Sebelum terjadi gerakan PRRI, sebelumnya pada tahun 1953 Aceh

---

<sup>7</sup>Audrey Kahin (2008), *Op.Cit.*, 281.

telah terlebih dahulu melakukan gerakan protes dengan mengumumkan bahwa Aceh menjadi bagian Negara Islam Indonesia (NII), suatu gerakan yang dipelopori oleh pemberontak muslim, Darul Islam, yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat.<sup>8</sup>

Gerakan PRRI meluas hingga ke Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Walaupun dipelopori oleh tokoh militer, namun yang tergabung di dalamnya banyak yang berasal dari sipil yang terdiri dari tokoh agama, pelajar, politikus, pejabat, dan lainnya. Hal ini disebabkan karena telah terjadi polarisasi politik di pemerintahan Soekarno. Sentimen etnis dan agama juga menjadi latar belakang munculnya ketidakpuasan pemerintah di daerah, terutama Sumatera Barat. Akan tetapi tidak masalah ini tidak dipandang sebagai hitam-putih seperti di daerah Darul Islam.<sup>9</sup> Berbagai persoalan itu hanyalah persoalan yang datang belakangan dan membuat situasi semakin memanas. Permasalahan utama hingga terjadinya gerakan PRRI merupakan ketidakpuasan pemerintah daerah yang telah bertahun-tahun dipendam kepada pemerintah pusat. Tidak adanya pembuktian sistem desentralisasi menumbuhkan mosi tidak percaya lagi kepada pemerintah Pusat.

Penelitian ini mencoba untuk melihat permasalahan seputar kegagalan penerapan sistem desentralisasi di Sumatera tengah, sehingga memicu munculnya gerakan PRRI sebagai sebuah aksi protes terhadap kebijakan pemerintah pusat. Berkembang dan meluasnya gerakan ini ke Sumatera bagian utara dan selatan menjadi

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 267-268

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 268.



poin tersendiri yang membuktikan bahwa kekecewaan terhadap pemerintah pusat tidak hanya dirasakan oleh daerah Sumatera Tengah.

## **B. Batasan dan Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka didapatkan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu,

1. Bagaimanakah upaya pemerintah pusat menerapkan sistem desentralisasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang sistem desentralisasi?
2. Bagaimanakah kronologis munculnya gerakan PRRI dan bagaimana upaya penyelesaiannya oleh pemerintah pusat?
3. Apa yang terjadi pada wilayah tempat terjadinya pemberontakan PRRI setelah gerakan ini berhasil diredam oleh pemerintah?

Batasan spasial penelitian ini adalah antara tahun 1956-1961. Tahun 1956 dipilih karena pada tahun tersebut rumusan untuk membuat suatu aksi protes terhadap pemerintah pusat dibuat. Selain itu pada tahun ini permasalahan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah juga semakin meruncing dan memanas. Sedangkan tahun 1961 dipilih karena pada tahun tersebut gerakan ini benar-benar dapat dibersihkan oleh pemerintah pusat. Ruang lingkup penelitian ini adalah Sumatera Barat. Selain karena kedekatan wilayah dengan penulis, di Sumatera Barat masih tersisa beberapa orang pelaku gerakan PRRI, baik yang berasal dari kalangan militer, sipil, maupun

tokoh politik, sehingga memudahkan penulis melakukan wawancara mendalam dengan para tokoh tersebut.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk,

1. Menganalisis upaya pemerintah pusat menerapkan sistem desentralisasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang sistem desentralisasi.
2. Melihat kronologis munculnya gerakan PRRI dan bagaimana upaya penyelesaiannya oleh pemerintah pusat.
3. Melakukan analisa mengenai apa yang terjadi pada wilayah tempat terjadinya pemberontakan PRRI setelah gerakan ini berhasil diredam oleh pemerintah.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Telah banyak sejarawan yang melakukan penelitian mengenai Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), seperti Audrey Kahin dalam bukunya yang berjudul *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Pembahasan mengenai PRRI dalam buku Kahin ini memang hanya terdiri dari satu Bab saja, tetapi ia menjelaskan secara deskriptif awal mula munculnya gerakan PRRI, sebab munculnya, perkembangannya, hingga berakhirnya gerakan ini.

Kompleksitas yang terjadi seputar gerakan ini juga digambarkan oleh Kahin dengan jelas.

Dalam buku ini Kahin lebih banyak menarik garis merah penyebab munculnya gerakan PRRI dengan kekecewaan kalangan militer. Padahal jika dilihat dari poin-poin yang dimunculkan oleh Dewan banteng, terlihat bahwa masalah ketidakmerataan ekonomi dan pembangunan menjadi faktor yang cukup besar sehingga memicu munculnya gerakan ini. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa gerakan ini dimotori oleh orang militer, tetapi diikuti oleh banyak masyarakat sipil. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan dalam tubuh militer tidak menjadi satu-satunya alasan sehingga gerakan ini muncul di Sumatera Tengah.

Departemen Pertahanan dan Keamanan melalui Pusat Sedjarah ABRI yang disusun oleh Makmum Salim pada tahun 1971 juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA*. Buku ini menjabarkan proses awal terjadinya gerakan PRRI di Sumatera dan PERMESTA di Sulawesi. Buku ini juga menggambarkan proses penyelesaian gerakan PRRI-PERMESTA oleh Pemerintah Republik Indonesia. Terbitan Pusat Sedjarah ABRI ini lebih mirip sebuah laporan kegiatan operasi militer pada saat terjadinya gerakan PRRI-PERMESTA.

#### **E. Kerangka Analisis**

Kajian ini berada pada ruang sejarah sosial. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992), sejarah sosial merupakan bidang kajian yang sangat beragam, yang di

dalamnya terdapat pembahasan mengenai gerakan sosial, nasionalisme, dan sejarah budaya.<sup>10</sup> Oleh karena itu Sartono Kartodirdjo menyarankan untuk menggunakan pendekatan yang multidimensional dalam menjelaskan sejarah sosial, yaitu dengan menggunakan berbagai kerangka konseptual dan konsep analisis dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini sebenarnya menimbulkan dampak yang baik, yaitu mampu mengatasi pendekatan yang deterministic, yang hanya memfokuskan pada satu faktor saja, dan mengantisipasi para peneliti untuk hanya fokus melihat peristiwa saja, dan menghiraukan sebab terjadinya peristiwa tersebut.<sup>11</sup>

Dalam melihat permasalahan gerakan sosial, seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pendekatan strukturisme seperti yang diuraikan oleh Lloyd tampaknya mendekati apabila dilihat dari konsep yang ia tawarkan. Lloyd menjelaskan bahwa kajian sejarah sosial berkaitan dengan tata aturan sosial, peranan, dan hubungan serta makna sosial. Kajian proses dari struktur sosial adalah memperhatikan interaksi individu, kumpulan, kelas dan keadaan sosial, serta keyakinan dan keinginan sosial. Pendekatan strukturisme berusaha untuk mengikat proses sejarah pada tingkat analisis mikro dan makro tanpa menjadikan sebuah aspek sebagai subordinasi atau pusat dari yang lainnya. Pada pendekatan ini, person atau orang berpotensi untuk menjadi agen perubahan dan struktur sosial merupakan kekuasaan yang dapat mewujudkan perubahan tersebut.<sup>12</sup> Selain Lloyd, Kuntowijoyo mengungkapkan bahwa struktur

---

<sup>10</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992) hlm. 157-159.

<sup>11</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982) hlm. 71-72.

<sup>12</sup> Christopher Lloyd, *The Structure of History* (Oxford: Blackwell, 1993), hlm. 44-47.

merupakan pikiran, produk mental, dan konstruksi pemikiran sejarawan. Konsep budaya dan geografis merupakan dua hal yang sangat penting bagi sejarawan untuk menjelaskan fakta-fakta sejarah. Oleh karena itu fakta-fakta sejarah tersebut dapat dijelaskan dengan memperhatikan struktur yang mengitarinya. Pendapat Sartono Kartodirdjo, Llyod, dan Kuntowijoyo ini sejalan dalam memandang masyarakat dan struktur di dalamnya. Dalam pandangan strukturisme, masyarakat berada dalam dua keadaan, yaitu sebagai masyarakat yang membuat perubahan (*agential people*) dalam struktur yang mengekang.<sup>13</sup> Struktur mempunyai sifat yang mengikat, tetapi ia dapat diubah, mengubah serta ditransformasikan sesuai dengan keinginan masyarakat di dalamnya.

Penelitian ini memfokuskan pada konflik yang terjadi antara masyarakat sebagai pembuat perubahan, dan pemerintah sebagai agensi struktural yang mengikat dan mengekang. Konflik ini menghasilkan sebuah gerakan sosial yang dikenal dengan sebutan gerakan PRRI di wilayah Sumatera, dan PERMESTA di wilayah Sulawesi. Penelitian ini tidak hanya fokus pada kronologis peristiwa gerakan sosial itu saja, tetapi juga pada analisa sebab dan akibatnya.

#### **F. Metode Penelitian dan Sumber yang Digunakan**

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah deskriptif-analitis. Batasan waktu antara tahun 1956-1961, memungkinkan pengumpulan sumber-sumber dilakukan dengan leluasa. Sumber-sumber dikumpulkan dari berbagai kriteria, baik berupa arsip

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 54-55.

pemerintah, surat kabar dan majalah, memoar, otobiografi, catatan harian, kebanyakan sumber terutama bersifat kualitatif yang memberikan penilaian dari sudut pandang politik, ekonomi, maupun sosial. Selain bergantung pada sumber tertulis, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara mendalam dengan pelaku gerakan PRRI. Di Sumatera Barat terdapat beberapa tokoh PRRI yang masih hidup dan masih bersedia untuk diwawancarai, seperti Basir A., Kasurin, Jarijis, Zubir, dan beberapa orang lainnya.

Wawancara mendalam adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi penelitian secara lisan dari informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada informan. Teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara tidak berstruktur. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan menggunakan teknik ini penelitian ini, informan hanya diberi beberapa pertanyaan awal, selebihnya informan dibiarkan menuturkan dengan bebas kronologis kejadian pada tahun 1965-1960 tersebut.

Untuk mendapatkan informan penulis menggunakan teknik *snowball*, yang memungkinkan penulis mendapatkan nama-nama lain pelaku PRRI untuk dijadikan informan. Teknik *snowball* atau teknik bola salju adalah sebuah teknik mencari informan berdasarkan satu informan kunci. Pada penelitian ini, Basir A. merupakan informan kunci, yang kemudian memberikan jalan untuk nama-nama informan lainnya. Basir A. dipilih sebagai informan kunci karena pada saat terjadi gerakan PRRI di Sumatera, ia memegang posisi kunci, yaitu sebagai pengawal pribadi

Komandan PRRI wilayah Padang, Jamaluddin Wak Ketok, atau yang populer juga dengan sebutan Yuang Apuk. Semua informan yang terdapat dalam penelitian ini sudah melalui tahapan triangulasi data. Penulis melakukan proses uji kebenaran, terutama terhadap informan kunci, dengan menelusuri rekam jejaknya di wilayah Kalumbuk Padang—rumah keluarga Jamaluddin Wak Ketok, dan juga di daerah Bayang Pesisir Selatan, tempat kelahirannya dan juga kediamannya hari ini.

Untuk sumber tertulis, setelah sumber-sumber tersebut terkumpul, maka dilakukan kritik sumber dengan cara melakukan pengujian untuk memperoleh fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Fakta-fakta yang sudah terseleksi tersebut akan dianalisis dengan cara memilah-milah atau mengklasifikasikan menurut kategori tertentu yang dibuat berdasarkan unit-unit permasalahan dan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah interpretasi dan eksplanasi berdasarkan perspektif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah terakhir merupakan penulisan laporan penelitian menjadi sebuah cerita sejarah atau historiografi sesuai dengan teknik-teknik penulisan sejarah dan kaedah-kaedah penulisan ilmiah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I dinamakan dengan pendahuluan yang berisi pertanggungjawaban ilmiah penulisan. Bab ini secara umum mengemukakan beberapa masalah yang terkait dengan latar belakang penelitian, rumusan dan ruang lingkup permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan

kepuustakaan, kerangka konseptual dan teoritis, serta metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Pada Bab II diuraikan mengenai sistem desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintahan Soekarno sejak tahun 1948. Dalam bab ini akan diuraikan keberhasilan atau kegagalan penerapan sistem desentralisasi tersebut.

Pada Bab III diuraikan mengenai kronologis munculnya gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Tengah yang sudah digagas sejak tahun 1956, lalu muncul dan melakukan perlawanan dari tahun 1957-1960. Pada bab ini juga akan diceritakan situasi sosial setelah berakhirnya gerakan PRRI di Sumatera Tengah.



## **BAB II**

### **PENERAPAN SISTEM DESENTRALISASI TAHUN 1948-1959**

Pasca dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS)<sup>14</sup> pada tahun 1950, kebanyakan pandangan politik di Indonesia menginginkan devolusi (pengurangan) kekuasaan pemerintah. Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan suatu sistem yang didambakan pada awal tahun 1950-an. Pandangan ini diterima oleh banyak pihak, karena dinilai sebagai bagian utama dari proses demokrasi di Indonesia. Apalagi pemerintah sudah merumuskan suatu perundang-undangan mengenai konsep sistem desentralisasi pada tahun 1948 yaitu undang-undang N0.22 tahun 1948. Dalam undang-undang ini, pemerintah membentuk tingkatan otonomi pemerintah di bawah tingkat nasional menjadi tiga bagian yaitu, pemerintah propinsi, pemerintahan

---

<sup>14</sup> Setelah Konferensi Meja Bundar Belanda Mencoba Membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah federasi, yaitu tujuh Negara bagian dan Sembilan unit wilayah konstitusional dengan status lebih rendah, serta beberapa daerah yang lebih kecil. Republik Indonesia berganti nama menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Akan tetapi setelah RIS digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, system federasi ini menurut Hatta merupakan suatu langkah awal untuk menghilangkan dasar tempat berpijak otonomi luas di daerah. Hatta yang merupakan pendukung utama pembagian kekuasaan di daerah pada akhirnya dengan menyesal membentuk Negara kesatuan yang terpusat. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat tidak siap untuk melakukan pembagian kedaulatan dan kekuatan politik antara pemerintah pusat dan daerah. Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 251-225.

kabupaten, dan pemerintahan desa. Masing-masing ingkatan ini akan saling melakukan koordinasi.

Dengan adanya undang-undang ini membawa angin segar bagi banyak wilayah khususnya di luar pulau Jawa, apalagi pada saat dibuat, undang-undang ini juga diperkuat dengan disahkannya pembentukan propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatra pada tahun 1950. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang ini pemerintah propinsi, kabupaten, dan desa akan memiliki kekuasaan yang cukup berarti untuk memerintah daerahnya. Pemerintah propinsi, kabupaten, dan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri, termasuk didalamnya urusan pembangunan, perbaikan infrastruktur, pemasaran dan distribusi barang, serta pemanfaatan pemasukan daerah, baik yang berasal dari pertambangan, pertanian, atau kelautan. Sementara pemerintah pusat hanya berfungsi sebagai pengawas saja.<sup>15</sup>

Pada saat isu desentralisasi marak dibicarakan di awal tahun 1950-an, partai politik yang ada pada umumnya mendukung diterapkannya sistem desentralisasi pada pemerintah Republik Indonesia. Mereka membayangkan akan ada pemilihan perwakilan daerah. Akan tetapi, pada kenyataannya pemilihan perwakilan di daerah tersebut tidak terjadi. Pemerintah pusat hanya membentuk badan-badan ad hoc atau sementara untuk menjadi perwakilan di daerah. Hal ini menimbulkan ketidaksetiaan ini meluas pada tahun 1951 ketika badan-badan tersebut dibekukan oleh pemerintah pusat, dan semakin menjadi-jadi pada tahun 1956, ketika badan sementara ini juga

---

<sup>15</sup> J.D. Legge, *Cultural Authority and Regional autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration 1950-1960* (Ithaca: Cornell University Press, 1961), hlm. 29-30.

dibubarkan oleh pemerintah, dan pemilihan bentuk perwakilan di daerah juga tidak kunjung terbentuk.<sup>16</sup>

Selama tahun-tahun awal 1950-an, banyak terjadi perdebatan di parlemen, di mana pendukung sistem desentralisasi dan otonomi luas bagi daerah berjuang untuk aturan yang lebih menguntungkan para dipulau Jawa. Salah satu usulan mereka adalah dibentuknya perwakilan dua kamar, seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Pemilihan perwakilan dua kamar ini berdasarkan jumlah penduduk di daerah. Maksudnya adalah bahwa keanggotaan salah satu dewan dipilih berdasarkan jumlah penduduk pada suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang banyak, maka daerah tersebut akan memiliki wakil di parlemen. Usul ini bersama dengan usul yang dimaksudkan untuk memerikan otonomi luas kepada daerah, di dalam parlemen dikalahkan dan ditolak dengan tegas. Pemerintah memutuskan untuk mengesampingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah hingga sesudah dibentuknya Dewan Konstituante yang dipilih, mengikuti pelaksanaan pemilu.<sup>17</sup>

Dalam undang-undang desentralisasi yang dibuat pada tahun 1948 yang kemudian diperbaharui lagi pada tahun 1950, menyatakan bahwa badan perwakilan daerah memilih calon-calon gubernur. Dalam hal ini pemerintah pusat hanya berperan memilih salah satu dari beberapa calon yang diajukan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, pada realisasinya pemerintah pusat menganggap remeh calon-calon gubernur yang diajukan oleh badan-badan sementara yang menjadi perwakilan di daerah

---

<sup>16</sup> Audrey Kahin (2008), *Op. Cit.*, hlm. 255-256.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 258.

tersebut, pada saat itu dewan perwakilan daerah belum terbentuk. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat tetap melakukan monopoli kekuasaan di daerah. Kepala daerah yang dipilih adalah anggota pamongpraja yang sering kali tidak berasal dari daerah tempat ia menjabat. Mayoritas dari mereka adalah orang Jawa.<sup>18</sup>

Masih dalam di dalam undang-undang desentralisasi 1948, secara keseluruhan Indonesia dibagi menjadi sepuluh propinsi, tiga diantaranya berada di pulau Sumatra, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Pembagian wilayah ini juga menimbulkan konflik, terutam di wilayah Sumatra Utara. Penggabungan wilayah Aceh dengan Tapanuli dan Sumatra Timur membuat kekusaran pada masyarakat Aceh. Status wilayah Aceh yang dikelan sebagai sebuah wilayah dengan keunikan sistem pemerintahan sudah dimaklumkan oleh Wakil Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara pada bulan Desember 1949. Maklumat ini tidak hanya dikarenakan keunikannya, tetapi juga karena kepentingan serta kesetiannya kepada Republik selama Revormasi. Oleh karena itu Aceh diizinkan untuk mendirikan propinsi yang terpisah dibawah pemerintahan yang dipimpin oleh Ketua Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yaitu Teungku Daut Beureu'eh yang telah menjadi Gubernur meliter Aceh selama tahun-tahun akhir revolusi.<sup>19</sup> Penggabungan wilayah Aceh dengan Sumatra Timur dan Tapanuli membuat ketidakpuasan dari kalangan orang-orang

---

<sup>18</sup>ibid, hlm. 257.

<sup>19</sup>ibid. hlm, 260.

terkemuka di Aceh. Ketidakpuasan ini memuncak dengan terjadinya pemberontakan Aceh melawan Jakarta pada 19 September 1953.<sup>20</sup>

Di daerah Sumatra Tengah, pergolakan politik tidak sehebat yang terjadi di wilayah Aceh pada awal tahun 1950an tersebut. Kekecewaan pada pemerintah pusat memang tidak dapat dihindarkan bagi sebagian besar masyarakat Sumatra Tengah. Hal ini disebabkan banyaknya birokrat Jawa yang menduduki jabatan penting di Sumatra Tengah, bahkan menduduki jabatan sebagai gubernur Sumatra Tengah. Krisis di wilayah Sumatra Tengah bermula dari perselisihan antara Mr. Nasrul yang menggantikan kedudukan Mr. St. Mohd Rasjid sebagai gubernur Sumatra Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra Tengah (DPRST). Pada perselisihan ini DPRST mengajukan pergantian gubernur, tetapi pemerintah pusat melalui M. Natsir sebagai perdana menteri Indonesia, dan Mr. Assaat sebagai menteri Dalam Negeri menolak untuk melakukan penggantian gubernur sesuai dengan calon yang diajukan oleh DPRST yaitu Mr. St. Mohd Rasjid dan H. Iljas Jacob. Pemerintah pusat justru menunjuk seorang birokrat Jawa, Roeslan Moeljohardjo sebagai gubernur Sumatra Tengah. DPRST menolak penunjukan tersebut, sehingga berujung pada pembekuan DPRST. Pembekuan DPRST ini diatur dan disahkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1951, yang berlaku khusus untuk Sumatra Tengah.<sup>21</sup>

Setelah pembekuan DPRST tersebut, banyak usaha yang dilakukan oleh politisi dan legislator di Sumatra Tengah untuk menciptakan otonomi bagi politik dan

---

<sup>20</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern 1200-2008* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 514.

<sup>21</sup> Audrey Kahin (2008), *Op. Cit.*, hlm. 263.

pemerintahan di daerah. Misalnya pada konferensi mengenai otonomi daerah pada akhir tahun 1953. Dalam konferensi tersebut utusan dari Sumatra Tengah yang terdiri dari utusan Sumatra Barat, Riau, dan Jambi menyampaikan keinginan mereka untuk membentuk Dewan Perwakilan Daerah, dan meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah nyata dalam proses desentralisasi. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak dengan tegas oleh menteri Dalam Negeri, Menteri Hazairin. Dengan tegas pemerintah melalui menteri Hazairin menyatakan bahwa undang-undang No. 22 tahun 1948 tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia pada saat itu.<sup>22</sup>

Setelah pembentukan Negara kesatuan pada agustus 1950, pemerintah pusat menunjukkan bahwa tidak ada lagi kemungkinan untuk otonomi daerah atau desentralisasi di daerah terutama yang berada di pulau Sumatra. Hal ini disebabkan karena terdapat kekuatiran pemerintah pusat terhadap daerah yang diberikan kedaulatan untuk otonomi luas akan mencoba untuk melepaskan diri dari Republik. Motif ketidakpercayaan ini bahkan menyampingkan fakta bahwa dua daerah di pulau Sumatra yaitu Aceh dan Sumatra Barat merupakan daerah yang paling loyal pada masa revolusi untuk meraih kemerdekaan. Dengan dibatalkannya penerapan sistem desentralisasi di pulau Sumatra, secara tidak langsung pemerintah pusat menunjukkan bahwa daerah yang ada di pulau Sumatra merupakan daerah yang kurang dipercayai.<sup>23</sup>

Pada tahun-tahun yang sama seiring memanasnya situasi politik antara pemerintah daerah dan pusat, upaya pemerintah untuk melakukan tindakan yang efektif untuk melanjutkan pengembangan ekonomi daerah luar pulau Jawa ternyata

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 264.

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 266.

gagal total. Selain itu pemerintah juga tidak mempunyai keinginan untuk memberikan desentralisasi pengurusan keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebutuhan mereka sendiri. Kegelisahan daerah bertambah ketika pemerintah pusat menganggarkan penjatahan keuangan luar negeri (*foreign exchange*). Negara Indonesia disalurkan untuk daerah dipulau jawa, tanpa mempertimbangkan daerah di luar pulau jawa juga merupakan penyumbang hampir tiga perempat dari anggaran tersebut. Sutan Takdir Alisjahbana pada pidato di depan Kongres Adat se-Sumatra di Bukittinggi pada tanggal 12-20 Maret 1957 bahkan menyebutkan bahwa 71% dari ekspor Indonesia berasal dari daerah Sumatra yaitu, 21% dari Sumatra Utara, 15% dari Sumatra Tengah, dan 35% dari Sumatra Selatan.<sup>24</sup> Hal ini sangat tidak masuk akal ketika pembangunan hanya terjadi di daerah pulau jawa saja, sedangkan daerah yang notabennya adalah daerah penyumbang terbesar justru tidak merasakan dampak dari pembangunan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan orang-orang yang hidup dan merasakan situasi pada saat itu, hingga terlibat dalam gerakan sosial tahun 1957, rata-rata menyebutkan bahwa pemerintah pusat sangat tidak adil dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Terdapat olok-olokan mengenai ketidakmerataan pembangunan tersebut. Olok-olokan ini menurut Basir A<sup>25</sup>, salah seorang tentara yang pada tahun

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Basir A. merupakan seorang tentara kelahiran tahun 1930 yang bergabung dengan Angkatan Darat pada tahun 1954. Setelah mengikuti pendidikan pada tahun 1950, ia ditempatkan di daerah Sibolga, dan kemudian dipindahkan ke wilayah Painan. Sebelum muncul gerakan PRRI, ia menyandang pangkat Sersan Mayor. Pada saat PRRI ia turut bergabung dengan tentara PRRI dan melakukan perlawanan kepada pemerintah pusat. Keberaniannya membuat ia dipercaya untuk menjadi pengawal pribadi Jamaluddin wak Ketok, komandan PRRI wilayah Padang, dan juga menjadi satu dari sepuluh orang

1955 bertugas di Sibolga, sangat populer di kalangan Angkatan Darat di wilayah Sumatra pada waktu itu. Berikut ini adalah olok-olokan yang mereka populerkan itu, “kalau datang ke Jawa, banyak ditemui papan peringatan, ‘awas jalan licin’. Sedangkan datang ke Sumatra, juga banyak papan peringatan yang ditemui, tetapi berbunyi, ‘awas jalan berbahaya’.”<sup>26</sup>

Pada pertengahan tahun 1955, gubernur Sumatra Tengah, Roeslan Moeljohardjo secara terbuka mengecam pemerintah pusat karena tidak mengalokasikan dana sedikitpun untuk membiayai belanja modal di daerah guna membangun jalan dan jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, irigasi, membeli kapal, dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Roeslan Moeljohardjo yang seorang birokrat Jawa lambat laun mulai menunjukkan sikap keberpihakan terhadap daerah, dan tidak lagi bertindak sebagai juru bicara pemerintah pusat. Roeslan kemudian berubah haluan menjadi pembela kepentingan daerah Sumatra Tengah.

Pada saat pemilu tahun 1955 pada 29 September 1955, ketidakpuasan daerah terhadap pusat bercampur dengan kesetiaan agama, dan memperkuat oposisi terhadap pemerintah pusat. Pada saat yang bersamaan pertentangan ideologi semakin menajam. Di wilayah Sumatra Tengah, bahkan terjadi konfrontasi antara partai agama, Masjumi dan Perti dengan partai sekuler, Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI di Sumatra Tengah beserta partai non-agama lainnya juga berusaha untuk menjatuhkan

---

yang ditugaskan untuk menjemput persenjataan ke Kapal Amerika Serikat di tengah samudra Hindia pada tahun-tahun awal terhadinya gerakan PRRI. Pada saat terjadinya gerakan PRRI, pangkatnya naik menjadi Letnan, dan kembali diturunkan pada saat PRRI menyerah pada pemerintah pusat.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Basir A. pada tanggal 13 Oktober 2015 di Bayang, Pesisir Selatan.

<sup>27</sup> Koran Haruan, 13 Juni 1955, Audrey Kahin (2008), hlm. 269.



Roeslan Moeljohardjo karena keaggotaannya dalam partai Masjumi. Akan tetapi ia tetap dipertahankan oleh partai agama seperti Masjumi, Perti, NU, dan partai agama lainnya.<sup>28</sup>

Setelah pemilu tahun 1955, kekecewaan orang-orang di Sumatra Tengah semakin besar karena selain kelanjutan masalah kekosongan demokrasi masih dihiraukan oleh pemerintah, naiknya Partai Nasional Indonesia (PNI) menggantikan kabinet Burhanuddin Harahap dari Masjumi juga menjadi factor lainnya. PNI yang memperoleh dukungan dari PKI dan partai non-islam lainnya menyebabkan ketidaksetiaan Sumatra Tengah terhadap pemerintah pusat menjadi-jadi.<sup>29</sup>

Gagalnya penerapan sistem desentralisasi tampaknya tidak hanya dalam hal kedaulatan dan keuangan saja. Ketidakmerataan yang sama juga dirasakan oleh militer. Ahmad Husein yang merupakan komandan Brigade Benteng yang kemudian dilebur dalam Resimen IV Sumatra Utara telah berkali-kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi dan keadaan hidup prajurit di Sumatra Barat yang tidak memadai dan dalam kondisi yang buruk. Bahkan bersama Gubernur Roeslan ia pernah memimpin delegasi ke Jakarta untuk menyampaikan protes mengenai keadaan tersebut. Pembentukan delegasi tersebut disetujui oleh gubernur Roeslan setelah Ahmad Husein mengajaknya mengunjungi barak-barak tentara Padang, Teluk Bayur, Solok, dan Padang Panjang pada Agustus 1956. Pada kunjungan ini Roeslan melihat kondisi kehidupan tentara tersebut sangat menyedihkan. Asrama dan barak yang

---

<sup>28</sup> Audrey Kahin (2008), hlm. 270.

<sup>29</sup> Hal ini disebabkan karena pada pemilu 1955, di Sumatra Tengah partai Islam telah merebut sekitar 70% suara.

disediakan untuk tempat tinggal tentara tersebut berada dalam kondisi yang sangat buruk, bahkan tidak layak untuk ditinggali. Selain tempat tinggal yang buruk, pelayanan kesehatan yang mereka terima juga sangat minim, anak-anak mereka menderita karena banyaknya penyakit dan kematian.<sup>30</sup> Akan tetapi, tetap tidak ada upaya perbaikan oleh pemerintah pusat setelah kunjungan delegasi ke Jakarta itu. Kekecewaan yang besar kemudian tidak hanya dimiliki oleh politikus dan orang-orang di partai politik saja, bahkan kalangan militer juga mulai merasakan ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kekecewaan yang dirasakan oleh kalangan militer sesungguhnya sudah dirasakan sejak dibubarkannya Divisi Benteng pada tahun 1952. Divisi benteng kemudian dilebur dalam Resimen IV Sumatra Utara. Pemerintah pusat menciutkan kekuatan militer di daerah Sumatra Tengah dengan tujuan agar kekuatan militer tidak terpusat di Sumatra Tengah, sehingga aksi makar dan pemberontakan di kalangan militer terhadap pemerintah pusat akan dapat dihindarkan.<sup>31</sup> Langkah ini sesungguhnya menjadi api dalam sekam bagi pemerintah pusat. Kalangan pemerintah yang berasal dari ex-divisi benteng terutama yang masih menduduki jabatan penting mulai mempertanyakan dan tidak senang dengan langkah dari pemerintah pusat tersebut. Ditambah lagi pada tahun-tahun berikutnya tidak ada niat baik pemerintah pusat untuk memperhatikan kondisi prajurit di luar pulau Jawa. Ketika kekecewaan

---

<sup>30</sup> Ibid., 278 dan wawancara dengan Kopral Jarijis pada tanggal 14 Oktober 2015 di kediamannya di nagari Kubang, Bayang Pesisir Selatan, yang pada tahun tersebut bertugas di Teluk Bayur. Jarijis juga membenarkan kedatangan delegasi ini pada saat ia tengah bertugas menjaga pos di Teluk Bayur.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Basir A., Jarijis, dan Kasurin pada bulan Oktober 2015, di tempat yang berbeda-beda, dari hasil wawancara mereka sepertinya sepakat mengenai penciptaan divisi benteng tersebut.

pada pemerintah pusat sudah merata disemua lapisan dan golongan masyarakat di Sumatra Tengah, hanya tinggal waktu munculnya sebuah gerakan sosial yang ada menentang pemerintah pusat.

### **BAB III**

## **GERAKAN PEMERINTAH REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA DI SUMATRA BARAT (PRRI)**

### **A. Munculnya Gerakan PRRI di Sumatra Barat**

Munculnya gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di tiga wilayah pulau Sumatra; Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan sesungguhnya sebuah bentuk ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang tidak bisa menerapkan desentralisasi dan otonomi luas kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Selain itu juga terjadi ketidak merataan pembangunan di wilayah luar pulau Jawa. Pulau Sumatra yang merupakan penyumbang 71% sumber keuangan pemerintah justru tidak mendapat anggaran sedikit pun untuk membangun daerah mereka. Tidak ada perbaikan infrastruktur untuk masyarakat sipil maupun kalangan militer. Hal ini menjadi pemicu bangkitnya sebuah gerakan sosial pada tahun 1957-1960 di wilayah Sumatra.<sup>32</sup>

Gerakan PRRI ini dimotori oleh kalangan militer, tetapi diikuti oleh semua kalangan sipil, politikus, tentara, polisi, guru, petani, dan orang-orang dari berbagai kalangan lainnya. Munculnya gerakan ini berawal dari adanya reuni oleh perwira ex-divisi Banteng yang dicitkan oleh pemerintah ke dalam Resimen IV Sumatra Utara.

---

<sup>32</sup> Audrey Kahin, dari Pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 266

Reuni ini bertujuan untuk mengumpulkan semua perwira 2x-Divisi Banteng yang tersebut di seluruh wilayah Nusantara. Ide untuk melaksanakan sebuah reuni ini muncul ketika Ahmad Husein yang sedang berkunjung ke Jakarta bersama delegasi Gubernur Roeslan untuk menuntut perbaikan bagi kehidupan tentara di wilayah Sumatra Tengah, Agustus 1956. Pada saat itu Ahmad Husein didekati oleh perwira ex-Divisi Banteng seperti Jusuf Noer, Dahlan Djambek, dan Sjoelib. Setelah pertemuan itu, beberapa hari kemudian mereka mengadakan pertemuan kembali. Namun kali ini dihadiri oleh banyak anggota yaitu sebanyak 123 orang. Kebanyakan dari mereka berasal dari Jakarta, namun juga terdapat beberapa orang dari daerah luar Jakarta seperti, Ahmad Husein yang merupakan komandan Resimen Infanteri IV Sumatra Utara, Nurmatias yang merupakan Komandan Bataliyon 140 resimen Infanteri IV, Bustanuddin Is yang merupakan staf Resimen Infanteri IV, Kamaruddin Dt, Machudum seorang mantan tentara dengan pangkat terakhir kapten, Soelaeman seorang mantan Mayor ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia), dan juga beberapa orang yang datang dari daerah Bandung.<sup>33</sup>

Pertemuan ini lebih bersifat silaturahmi membuat sebuah rencana untuk mengadakan sebuah reuni ex-Divisi Banteng, mengingat bahwa sudah terlalu lama mereka yang merupakan teman seperjuangan pada masa revolusi itu terpisah satu dan yang lainnya, disebabkan karena tempat tugas mereka sejak terjadi penciptaan Divisi Banteng menjadi tersebar dimana-mana. Keanjutan dari pertemuan ini adalah dibentuknya panitia reuni yang diketahui oleh Mayor Sofyan, dan akan dilaksanakan

---

<sup>33</sup> Makmum Salim, *Sedjarah Operasi-operasi Gabungan terhadap PRRI-PERMESTA* (Jakarta: Departemen Pertahanan-Kemampuan Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hlm. 1-2

di padang pada tanggal 20-24 November 1956. Acara reuni tersebut dihadiri oleh 612 orang ex-Divisi Banteng. Dalam reuni terakhir tanggal 24 November 1956, semua yang hadir membuat dan menandatangani kesepakatan yang mereka beri nama Piagam Banteng yang nantinya akan mereka suarakan pada pemerintah pusat.<sup>34</sup>

Dalam Piagam Banteng tersebut mereka memutuskan tuntutan pada empat bidang utama yaitu,

1. Masalah Negara pada umumnya yaitu tuntutan untuk segera melakukan perbaikan yang cepat dan progresif di semua bidang, terutama dalam hal kepemimpinan angkatan darat, dan selanjutnya juga dalam kepemimpinan Negara.<sup>35</sup>
2. Pada bidang pemerintahan daerah, menuntut pemberian otonomi seluas-luasnya yang bertujuan untuk pembangunan daerah, dan juga menuntut adanya pertimbangan untuk penempatan pemimpin di daerah agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan produktif.<sup>36</sup>
3. Pada bidang pertahanan daerah, menuntut desentralisasi dalam militer yaitu dengan pembentukan suatu komandan pertahanan daerah yang meliputi wilayah territorial, kooperatif, dan administrative yang sesuai dengan pembagian wilayah administrative oleh pemerintah pusat. Selain itu mereka

---

<sup>34</sup>Ibid, hlm. 2-3 dan Audrey Kahin (2008), Op. Cit, hlm 280.

<sup>35</sup>Audrey Kahin, Ibid.

<sup>36</sup> Makmum Salim (1971), Op. Cit., hlm 3.

juga menuntut untuk menjadikan semua ex-Divisi Banteng kembali ditarik dan ditempatkan kembali dalam satu korps dalam angkatan darat.<sup>37</sup>

4. Dalam bidang sosial dan ekonomi daerah, menuntut untuk menghapuskan sistem sentralisasi yang pada kenyataannya menimbulkan suatu birokrasi yang kurang sehat. Sistem desentralisasi menutup kemungkinan para utusan dari daerah berinisiatif untuk meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seperti yang telah dilihat pada tahun-tahun sebelumnya, ketika usulan dari perwakilan daerah tidak pernah diterima oleh pemerintah pusat.<sup>38</sup>

Seluruh hasil kesepakatan pada reuni tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Untuk menyampaikan kesepakatan tersebut, maka perlu dibentuk suatu dewan delegasi, yang mereka namakan Dewan Banteng, Dewan Banteng terdiri dari beberapa anggota yaitu,<sup>39</sup>

1. Letkol Ahmad Husein (Komandan Resimen Infanteri IV) sebagai ketua Dewan Banteng.
2. Kaharuddin Dt. Rangkajo Basa (Kepala Polisi Propinsi Sumatra tengah).
3. Sjech Ibrahim Musa Parabek.
4. Major Sjubu (wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat atau SUAD)
5. H. Darwis Taram Dt. Tumenggung (Bupati, tapi tidak disebutkan wilayahnya).

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid, hlm.4.

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 2.

6. Major Anwar Umar (Kepala Staf Resimen Infateren IV)
7. Sutan Soes (Kepala Polisi Kota Padang).
8. Soeleman (Kepala BRN Sumatra Tengah yang juga merupakan mantan Mayor ALRI).
9. Hasan Basri (ex Komandan Resimen IV Divisi Banteng).
10. Kapten Nurmatris (Komandan Bataliyon Infateren 140).
11. A. Abdul Manaf (Bupati Kabupaten Merangin, Jambi)
12. Saidina Ali (Kepala Djawatan Sosial Kabupaten Kampar).
13. Dt. Simaradjo (Ninik Mamak).
14. Kapten Jusuf Nur (Direktorat Kehakiman Angkatan Darat).
15. Lettu Sebastian (Perwira Komandan Distrik Militer atau KDM 20 Indragiri).
16. Ali Luis (Bupati)
17. Ismail Lengah (pensiunan Kolonel).

Beberapa hari kemudian sebuah tim delegasi berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan tersebut yaitu diantaranya, Ali Luis, Sitan Soeis, Hasan basri, Sidi Bakaruddin, Dahlan Djambek, Dahlan Ibrahim, dan Amdul Halim. Tujuan mereka semula adalah bermaksud untuk menemui Presiden, Wakil Presiden, anggota Kabinet, dan pimpinan lainnya. Akan tetapi mereka hanya mampu bertemu Kepala Sekretariat Presiden, Mr. A. G. Pringgodigdo. Walaupun Perdana Menteri Ali Sastroamdjoko menerima mereka secara pribadi di kediamannya, penerimaan pemerintah pusat terhadap delegasi ini menimbulkan sakit hati bagi Dewan Banteng

karena mereka merasa upaya mereka untuk menyampaikan tuntutan tersebut sangat diremehkan oleh pemerintah pusat.<sup>40</sup>

Pada tanggal 1 Desember 1956, Mohammat Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara Soekarno dan Hatta dalam melihat kondisi dalam Negeri, dan dalam membuat kebijakan. Dengan pengunduran diri dari Hatta, elit politik dan militer di Sumatra Tengah melihat bahwa tidak ada lagi wakil dari wilayah Sumatra Tengah yang menjabat di pemerintah pusat. Hal ini akan membuat tuntutan mereka akan sistem desentralisasi dan otonomi akan mustahil untuk diwujudkan. Oleh karena itu, tiga minggu setelah pengunduran diri Moh.Hatta yaitu tanggal 20 Desember 1956, anggota Dewan Banteng dan pejabat militer dan sipil lainnya melakukan pertemuan di Bukittinggi, pada pertemuan ini, gubernur Roeslan Muljohardjo secara resmi menyerahkan kekuasaannya sebagai gubernur wilayah Sumatra Tengah kepada Letkol Ahmad Husein.<sup>41</sup>

Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein tidak hanya didukung oleh kekuatan militer saja. Dewan Banteng juga didukung oleh Spectrum yang luas dari masyarakat. Selain itu dukungan dari partai Masjumi juga sangat besar, walaupun gerakan ini bukanlah gerakan Islam seperti Darul Islam di Aceh, dan dibuktikan dengan bergabungnya perwira-perwira Kristen seperti Simbolon dan Sumual. Tujuan utama dari gerakan ini bukanlah membuat sebuah negara dalam

---

<sup>40</sup>Hasril Chaniago dan Khairul Jasmin, Brigadir Jenderal polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hlm. 227-228.

<sup>41</sup> Audrey Kahin (2008), hlm. 281.



negara, tetapi lebih kepada realisasi Piagam Banteng yang telah mereka sepakati pada 25 November 1956 lalu.

Selama enam bulan sesudah diumumkannya pengambilan jabatan gubernur oleh Letkol Ahmad Husein, pemerintah pusat terlihat tidak terlalu tertarik mengambil sikap terhadap wilayah Sumatra Timur. Pemerintah pusat terkesan membiarkan Ahmad Husein memiliki kekuasaan setidaknya hanya di wilayah Sumatra Barat saja.<sup>42</sup> selama enam bulan tersebut, Dewan Banteng berhasil mewujudkan tujuan dalam kesepakatan Piagam Banteng. Bahkan, pemerintah pusat terkesan bersedia untuk memberikan otonomi daerah sampai tingkat tertentu seperti yang mereka tuntut pada Piagam Banteng tersebut.<sup>43</sup>

Salah satu keberhasilan besar Dewan Banteng adalah ketika mereka berhasil menghambat jalan keluar devisa wilayah Sumatra Tengah yang sebelumnya akan mengalir ke pemerintah pusat. Menurut John Legge, dalam waktu Sembilan bulan mulai dari Januari sampai September tahun 1956, Sumatra Tengah memperoleh Devisa sebesar Rp. 1.137.000.000,- dan pajak sebesar Rp. 170.000.000,-. Dari total keseluruhan, Sumatra Tengah hanya mendapat Rp. 60.000.000,- saja untuk pengelolaan daerahnya.<sup>44</sup> Ketika devisa propinsi ini tidak diberikan kepada pusat, Ahmad Husein mencoba untuk mewujudkan otonomi luas kepada masing-masing

---

<sup>42</sup>Kekuatan Dewan Banteng hanya mendapat respon positif di Wilayah Sumatra Barat saja, karena keseragaman etnis Minangkabau. Daerah Riau dan Jambi lama-kelamaan menjadi tidak senang atas dominasi orang Minangkabau, sehingga dukungan mereka terhadap Dewan Banteng pun menjadi berkurang, dan bahkan Hilang sama sekali.

<sup>43</sup>Ibid, hlm. 290.

<sup>44</sup>J. D. Legge, *Cultural authority and Regional autonomy in Indonesia: A Study in Local administration 1950-1960* (Ithaca: Cornell University Press, 1961), hlm. 237.

daerah di Sumatra Tengah, dengan pemberian Rp. 1.000.000,- untuk setiap kabupaten setiap bulannya, dengan tujuan dana ini akan digunakan untuk pembangunan. Pembagian dana ini memicu masyarakat dan menghasilkan jalan-jalan baru, proyek-proyek irigasi, jembatan-jembatan, sekolah-sekolah, dan rumah sakit dibangun di daerah-daerah tersebut.<sup>45</sup>

Selama bulan-bulan keberhasilan Dewan Banteng dalam mewujudkan sistem desentralisasi tersebut, terdapat kedua kekuatan yang bertindak sebagai oposisi dari Dewan Banteng, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan sebagai dari penduduk Riau dan Jambi ketidak senangnya terhadap Dewan Banteng bahkan menyebar hingga keselatan Kerinci, yang merupakan batas wilayah Sumatra Barat. Kebencian PKI terhadap Dewan Banteng adalah dikarenakan dukungan Masjumi dan PSI terhadap Dewan Banteng sangat besar. PKI mulai menyebarkan isu bahwa Dewan Banteng adalah gerakan yang tidak didukung oleh masyarakat Sumatra Tengah karena terlalu anti demokrasi dan reaksioner. PKI juga dengan terang-terangan mengungkapkan bahwa mereka adalah satu-satunya partai yang menentang Dewan Banteng. Pertentangan antara PKI di pimpinan pusat dan Dewan Banteng menjadi mengganas ketika beberapa orang anggota serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI ditangkap oleh Dewan Banteng. Akan tetapi Sumatra Tengah kondisi yang panas antara PKI dan Dewan Banteng tidak terlalu terlihat. Hal ini disebabkan beberapa tokoh PKI di daerah bahkan menyatakan dukungannya terhadap Dewan Banteng, dan

---

<sup>45</sup> Audrey Kahin (2008), Op, Cit, hlm. 292.

meninggalkan PKI. Hal ini menyebabkan terjadinya keretakan ditubuh PKI di Sumatra Tengah.<sup>46</sup>

Ditengah perselisihan yang terjadi antara Dewan Banteng- PKI-Riau dan Jambi, Ahmad Husein mengambil langkah penting yaitu, membentuk daerah otonomi bagi Riau dan Jambi. Daerah Riau dan Jambi diangkat menjadi daerah otonomi setingkat propinsi, dan pada tanggal 15 Oktober 1957 Ahmad Husein melantik Gubernur Riau yang pertama. Hal ini memang mengurangi reaksi keras dari masyarakat Riau, tetapi pada saat pemberontakan mereka dengan terang-terangan menyatakan menolak untuk turut bergabung dengan Ahmad Husein. Lain halnya dengan Jambi, yang pada saat terjadi perlawanan mereka ikut membantu Dewan Banteng tersebut.<sup>47</sup>

Pada bulan April 1957, kabinet baru terbentuk menggantikan kabinet Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini dipimpin oleh Djanda Kartawidjaja, sehingga dinamakan kabinet Djuanda. Pada awal terbentuknya, Perdana Menteri Djuanda mengunjungi Dewan Banteng untuk meyakinkan Dewan Banteng bahwa ia dan kabinetnya mempunyai tujuan untuk benar-benar menerapkan desentralisasi di daerah. Dalam pertemuan ini Ahmad Husein menyatakan tiga kerangka pokok tuntutan Dewan Banteng yaitu,

1. Otonomi luas di daerah.
2. Keseimbangan keuangan pusat dan daerah, membuang sentralisme, dan membentuk Dewan yang terdiri dari wakil daerah.

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 194-295.

<sup>47</sup> Makmum Salim (1971), hlm. 6.

### 3. Perbaiki kepemimpinan angkatan bersenjata.

Dengan adanya pertemuan ini jalan untuk melakukan kompromi damai antara Sumatra Tengah dengan pemerintah pusat tampaknya akan terbuka lebar. Tetapi, PKI di ibukota mulai menyebarkan isu tentang keterlibatan Dewan Banteng dalam pasukan pemberontakan di daerah Jawa Barat, dan juga penyerangan kantor PKI di Jakarta. Posisi Ahmad Husein menjadi terjepit ketika beberapa orang buronan yang diterima oleh Dewan Banteng mulai membuka peluang terhadap kekuatan asing. Salah satunya adalah Dr. Sumitro Djojohadikusumo, yang melarikan diri karena tuduhan penyalahgunaan keuangan di Jakarta. Sumitro meminta perlindungan pada Dewan Banteng sambil tetap melakukan perjalanan keluar negeri. Melalui Sumitro kekuatan asing terutama dari Amerika Serikat mulai tertarik untuk memberikan bantuannya kepada Dewan Banteng. Disatu sisi hal ini sungguh menarik bagi Amerika Serikat, karena akhirnya mereka menemukan sekutu local dalam usaha mereka untuk memerangi kekuatan komunis di Asia Tenggara.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zubir,<sup>49</sup> diantara elit-elit partai Masjumi, beredar desas-desus yang menyatakan bahwa Sumitro ketika melakukan perjalanan keluar negeri adalah bertujuan untuk mencari kekuatan asing, karena melihat situasi politik pemerintah pusat, bentrok antara Dewan Banteng dan pemerintah pusat tidak

---

<sup>48</sup> Audrey Kahin (2008), *Op, Cit.*, hlm.304-305.

<sup>49</sup> Zubir merupakan salah satu Tentara Pelajar (TP) kelahiran tahun 1935 yang ikut melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat pada saat terjadi gerakan PRRI. Pada saat terjadi gerakan PRRI, Zubir merupakan salah seorang murid PGA (Pendidikan Guru Agama setingkat SMA) di Painan Pesisir Selatan. Selama menjadi murid PGA ia aktif diorganisasi Masjumi, dan kerap melakukan pertemuan di Padang. Keaktifannya di Masjumi dikarenakan kakak kandungnya yang bernama Buya Djasad merupakan pentolan Masjumi daerah Pesisir Selatan yang terkenal keras dalam pemikirannya dan anti-komunis.

mungkin dapat dihindarkan pada suatu hari nanti. Oleh karena itu ia berusaha untuk menjalin kerja sama terutama dengan Amerika Serikat, dengan harapan akan mendapatkan bantuan persenjataan untuk mendukung gerakan perlawanan Dewan Banteng nantinya. Amerika Serikat dinilai sekutu yang tepat karena Negara tersebut juga mempunyai keinginan yang kuat untuk menghapuskan paham-paham komunis di Asia Tenggara. Sumitro juga orang yang bertugas untuk mengatur penjualan komoditor ekspor daerah Sumatra Tengah. Tidak selalu barang tersebut ditukarkan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang (*Barter*).<sup>50</sup>

Peristiwa puncak yang menyebabkan meletusnya gerakan perlawanan PRRI adalah ketika dibentuknya piagam Palembang pada tanggal 8 September 1957 yang disepakati oleh Kolenel Barlian, Letkol Ahmad husein, Kolonel Sumual, Dahlan Djambek, Lubis, Simbolon, dan Sumitro. Isi dari piagam Palembang ini adalah,<sup>51</sup>

1. Mengembalikan Dwitunggal Soekarno-Hatta.
2. Mengganti kepemimpinan Militer pusat yang ada (berarti memberhentikan Nasution)
3. Melaksanakan kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah.
4. Membentuk senat.
5. Meremajakan dan menyederhanakan pemerintah.
6. Melarang komunis yang berorientasi internasional.

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Zubir, 14 Oktober 2015 di kediamannya nagari Lubuk Aur, Bayang Pesisir Selatan.

<sup>51</sup> Audrey Kahin (2008), Op, Cit., hlm. 307.

Pada tanggal 9 Januari 1958, Dewan Banteng mengadakan pertemuan di sungai Dareh. Dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan apapun diantara anggota Dewan Banteng. Alan tetapi desas-desus mengenai akan dibentuknya sebuah Negara Sumatra cepat beredar dan akhirnya sampai ke ibukota. Apalagi setelah pertemuan Sungai daerah tersebut Sumitro melakukan perjalanan ke Singapura dan membuat rencana untuk memperoleh dukungan militer dari luar jika terjadi perlawanan di daerah. Perkembangan situasi pada saat itu bergerak dengan liar. Hal ini menimbulkan kecemasan banyak anggota Dewan Banteng bahwa tujuan perjuangan ini sudah melenceng dari tujuan awal mereka. Sumitro, Simbolon, dan Sumual mulai memperlihatkan keinginan untuk pembentukan Negara Sumatra. Pada tanggal 6 Februari 1958, Ahmad Husein menyiarkan pidato bahwa ia menolak tuduhan Dewan Banteng berusaha untuk mendirikan Negara Sumatra. Pidato ini cukup menenangkan elit politik yang ada di ibukota, tetapi Ahmad Husein juga mengirimkan ultimatumnya mengenai pengembalian mandate Kabinet Djuanda, dan menuntut penunjukan Hatta dan sultan Yogyakarta sebagai formatur kabinet baru yang akan dibentuk. Ultimatum ini ditolak dengan tegas oleh kabinet Djuanda. Kabinet memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Dewan Banteng, dan pemberhentian tidak hormat semua militet yang terkait dengan Dewan Banteng.<sup>52</sup> Untuk menghentikan aksi perlawanan di Sumatra Barat tersebut dilancarkan operasi tegas, Operasi Saptamarga, Operasi Sadar, dan Operasi 17 Agustus.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 327.

<sup>53</sup> Makmum Salim (1971), hlm. 18-52.

## B. Penumpasan Gerakan PRRI di Sumatra Barat

Setelah ultimatum yang dikeluarkan oleh Dewan Banteng melalui Ahmad Husein kepada pemerintah pusat, pada tanggal 11 Februari 1958, Kabinet Djuanda beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Sekretaris Jendral Kementerian Pertahanan mengadakan pertemuan untuk membahas ultimatum yang dikeluarkan oleh Ahmad Husein. Dalam pertemuan tersebut kemudian diambil keputusan bahwa,<sup>54</sup>

1. Pemerintah pusat menolak ultimatum Ahmad Husein dan kawan-kawannya.
2. Berdasarkan peraturan No. 3 tahun 1958 pasal 1 ayat 2, maka diambil keputusan bahwa Letkol Ahmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, dan Kolonel Simbolon dibebaskan dari dinas tentara dengan tidak hormat.

Setelah pertemuan tersebut, penguasa perang pusat mengeluarkan keputusan nomor Kpts/PEPERPU/031/1958,<sup>55</sup> yang isinya menyatakan bahwa staf Komando daerah militer Sumatra Tengah dibekukan. Selain itu pemerintah pusat juga mengeluarkan perintah untuk menangkap empat orang perwira yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut.

Dengan ditolaknya ultimatum dari Ahmad Husein oleh pemerintah pusat, maka pada tanggal 15 Februari 1958, Dewan Banteng mengumumkan pembentukan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), beserta dengan pejabat-pejabat

---

<sup>54</sup>Ibid, hlm. 13.

<sup>55</sup>Ibid, hlm. 14.

peting yang ada didalam PRRI. Beberapa pejabat yang disebut adalah Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojohadikusumo, Muhammad Syafei, dan banyak lagi lainnya. Proklamasi PRRI ini diterima dengan baik oleh Indonesia bagian timur. Segera setelah itu mereka mengumumkan bahwa wilayah Indonesia Timur melepaskan diri dari Indonesia. Lalu pada tanggal 18 Februari 1958, pemerintah pusat melakukan KSAD menyatakan bahwa tidak boleh berdiri dewan-dewan di daerah. Pada saat itu telah terbentuk lima buah gerakan dewan yang berniat melakukan pemberontakan kepada pemerintah pusat yaitu, Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, PERMESTA, dan Dewan Lambung Mangkurat.<sup>56</sup>

Satu persatu operasi militer kemudian dilakukan di daerah Sumatra, Sulawesi Utara dan Tengah. Untuk wilayah Sumatra pemerintah pusat melancarkan operasi tegas, operasi Saptamarga, Operasi Sadar, dan Operasi 17 Agustus. Dalam melancarkan operasi tersebut militer pemerintah pusat mengalami kesulitan, dikarenakan anggota PRRI memiliki persenjataan yang lengkap dan canggih. Senjata ini mereka dapatkan dari bantuan pihak asing, yaitu Amerika Serikat. Setelah pertemuan di Sungai Dareh, Sumitro kemudian berhasil mencari bantuan dukungan terutama persenjataan kepada Amerika Serikat. Dalam mendistribusikan persenjataan ini elit PRRI menunjuk sebuah tim yang terdiri dari 10 orang yang bertugas untuk menjemput persenjataan tersebut ketengah lautan samudra Hindia.

Menurut seorang narasumber, mereka berangkat dari Teluk Bayur pada suatu malam. Kemudian terus belayar di tengah lautan tanpa melihat daratan

---

<sup>56</sup> Ibid.



sedikitpun. Pelayaran ini memakan waktu selama tujuh malam. Pada malam ketujuh mereka bertemu dengan sebuah kapal besar, dan empat buah kapal *tongkang* kecil. Komandan regu kemudian naik ke kapal besar tersebut, dan tidak lama kemudian turun kembali. Setelah itu mereka mengikat empat buah kapal tongkang tersebut di kapal mereka, dan menariknya pulang ke arah Teluk Bayur. Sesampainya diteluk bayur pada dini hari dibantu oleh beberapa orang yang sudah menunggu di darat, mereka memindahkan persenjataan tersebut di gudang di sekitar daerah teluk bayur. Pada saat dipindahkan ini tim yang sepuluh orang tersebut sadar bahwa yang mereka bawa ini adalah persenjataan dan amunisi.<sup>57</sup>

Gerakan PRRI pada kenyataan memang unggul dalam perlawanannya di darat, akan tetapi PRRI tidak mempunyai kekuatan dan kelebihan di udara dan laut. Hal ini menjadi kunci kelemahan gerakan PRRI. Mantan wakil Presiden Hatta menyadari hal ini. Dalam sebuah pertemuan di Padang bersama Ahmad Husein dan komandan PRRI wilayah Padang, Jamaluddin Wak Ketok, Hatta mengungkapkan kekuatirannya bahwa perlawanan PRRI pada masa itu mungkin masih premature. Dalam pertemuan itu Hatta mengungkapkan kalau seandainya kita bisa bersabar sekitar dua tahun lagi, karena pemerintahan Amerika Serikat di Kanada saat itu sedang melatih beberapa anggota PRRI untuk menjadi pilot pesawat tempur. Ahmad Husein sepertinya menyadari hal tersebut. Hanya saja waktu tidak bisa lagi diulang. Perlawanan sudah terlanjur terjadi.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan salah satu dari tim 10 tersebut yaitu Basir A., pada tanggal 13 Oktober 2015 di Bayang, Pesisir Selatan.

<sup>58</sup> Selain atas desakan Sumitro dan Simbolon, langkah perlawanan PRRI ini diputuskan sesegera mungkin karena disebabkan desakan dari Masjumi dan PSI. Masjumi dan PSI mendesak Dewan Banteng untuk segera melakukan perlawanan melihat situasi politik partai komunis Indonesia yang semakin

Dalam penumpasan gerakan PRRI, pemerintah pusat pertama kali menutup mengepung Riau daratan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengelabui orang PRRI bahwa pemerintah pusat akan menyerang melalui jalur darat. Tanpa mereka sadari, pada saat itu kapal perang pemerintah sedang mendekati wilayah Teluk Bayur. Di saat lengah, kapal perang tersebut melancarkan tembakan ke arah Gunung Padang dan sekitarnya. Selain tembakan dari kapal, pemerintah pusat juga melakukan manuver tembakan dari udara. Setelah melakukan tembakan, barulah pasukan infanteri mereka masuk ke wilayah Padang, pemerintah pusat menggunakan taktik politis. Mengetahui bahwa komandan PRRI, Jamaluddin Wak Ketok merupakan komandan Kompi Pagaruyung sebelum dipindahkan ke Padang, pemerintah pusat menarik semua anggota Kompi pagaruyung yang anggotanya adalah mantan bawahan Wak Ketok dahulunya. Anggota Kompi ini yang kemudian diletakkan oleh pemerintah pusat di garis depan untuk menjadi busur panah menembus pertahanan PRRI di Padang.<sup>59</sup>

Pemerintah pusat mengirimkan pasukan Diponegoro dan pasukan Brawijaya untuk menyerang dan menumpas habis gerakan PRRI. Sebelumnya pemerintah telah meminta pasukan Siliwangi untuk dikirim menumpas PRRI, akan tetapi banyak dari pasukan Siliwangi yang enggan dan keberatan menumpas PRRI yang notabennya adalah teman mereka sendiri. Berbeda dengan pasukan Diponegoro dan Brawijaya

---

kuat di pemerintahan. Hasil wawancara dengan Basir A., yang pada saat pertemuan di Padang tersebut ia bertugas sebagai pengawal pribadi Jamaluddin Wak Ketok yang juga merupakan Mamak Rumah Basir A.

<sup>59</sup> Makmum Salim (1971), hlm. 18-20. Dan hasil wawancara dengan Basir A., pada tanggal 13 Oktober 2015 di Bayang Pesisir Selatan dan Rusli Marzuki Syaria yang pada waktu itu merupakan salah satu anggota brigade Mobil di Padang pada Juni 2011.

yang sebagian besar pasukannya adalah orang komunis, yang memang memiliki sentimen khusus bagi PRRI yang didukung langsung oleh Masjumi yang saat itu bermusuhan sekali dengan PKI. Tujuan pasukan yang datang ke Sumatra untuk menghentikan PRRI memang bukan untuk meminta mereka menyerah, tetapi untuk menghabisi dan menumpas mereka.<sup>60</sup>

Berlawanan dengan tujuan dari pasukan pemerintah pusat, di Sumatra Barat khususnya, Ahmad Husein sebagai komando tertinggi ternyata menyampaikan sebuah perintah yang diteruskan oleh bawahannya hingga kepasukan gerilya diberbagai daerah di Sumatra Barat. Ia meminta kepada seluruh pasukan PRRI untuk sedapat mungkin menghindari konfrontasi atau pertempuran langsung dengan pasukan pusat. Berikut ini adalah perintah yang ia sampaikan,

“PRRI dan pasukan pemerintah pusat adalah satu. Kita sama-sama Indonesia. Jika mereka datang, kita mundur atau sembunyi. Jika mereka sudah pergi, kita keluar kembali. Penyerangan hanya akan membawa kerugian bagi Indonesia. Yang tetap bertahan hidup adalah pemenang, sedangkan nyawa yang terbuang sia-sia tidak akan berarti sedikitpun.”<sup>61</sup>

Setelah banyak kantong-kantong perlawanan PRRI yang dikuasai oleh pasukan pemerintah pusat pada Juli 1960, mereka berhasil menyingkirkan beberapa tokoh PRRI seperti Sjafruddin Prawiranegara, Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Assat, sehingga akhirnya menyerah dan dinamakan oleh pemerintah pusat, tetapi pada

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Zubir pada tanggal 14 Oktober 2015. Menurut Zubir ia mengetahui hal ini karena ketika pasukan pemerintah pusat sampai di daerah Bayang, ia yang menyamar menjadi petani menanyakan hal tersebut kepada beberapa prajurit yang tengah beristirahat. Tubuhnya yang kecil dan pendek ternyata tidak memancing kecurigaan dari pasukan pemerintah pusat. Bahkan beberapa prajurit meminta dicarikan buah kelapa kepada Zubir.

<sup>61</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, Basir A., Jarijis, Zubir, Rusli Marzuki, dan Kasurin, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda.

dasarnya pasukan pemerintah pusat masih merasa kesulitan dan tidak aman di daerah-daerah yang jauh dari jalan raya, terutama di wilayah Padang. Gerakan perlawanan PRRI akhirnya benar-benar berhenti ketika Nasution sebagai komandan tertinggi militer pemerintah pusat melancarkan operasi pemanggilan kembali pada akhir tahun 1960. Operasi ini bertujuan untuk merangkul kembali terutama perwira militer PRRI yang ikut dalam perlawanan untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Melalui operasi ini ia mengirim utusan ke daerah perlawanan untuk melakukan negosiasi dengan PRRI. Akhirnya pada tanggal 21 Juni 1961, pimpinan PRRI, Ahmad Husein resmi menyerahkan diri beserta 600 pasukannya di Solok.<sup>62</sup>

### **C. Dampak Gerakan PRRI Bagi Masyarakat Pasca Dibubarkannya PRRI oleh Pemerintah Pusat**

Dari semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menghentikan perlawanan PRRI, hal yang sangat disayangkan adalah menyusupnya orang komunis dalam pasukan pusat tersebut. Operasi untuk menjemput kembali PRRI ke pangkuan ibu pertiwi ternyata menjadi ajang pembalasan beberapa tokoh komunis terhadap tokoh-tokoh PRRI yang sangat anti komunis. Seperti yang dialami oleh Dahlan Djambek yang pada tahun 1957 membuat sebuah gerakan anti komunis yaitu Gerakan Bersama Anti Komunis (GERBAK) di Padang. Setelah penyerahan Ahmad Husein pada tanggal 21 Juni 1961, Dahlan Djambek tidak turut serta menyerah pada pemerintah pusat. Ia setuju untuk menyerah pada September 1961. Akan tetapi ia tidak pernah

---

<sup>62</sup> Audrey Kahin (2008), hlm. 354.

merasakan dinginnya penjara, Karen pada tanggal 13 September 1961, beberapa pasukan beraliran komunis kemudian menembak mati Dahlan Djambek beserta ajudannya. Khawatir akan reaksi pengikut Dahlan Djambek yang masih berkeliaran, merek memgancam penduduk sekitar untuk tutup mulut dan kemudian menyebarkan desas-desus bahwa Dahlan Djambek sudah melarikan diri.<sup>63</sup>

Setelah menyerah kalah pada tanggal 21 Juni 1961, tokoh-tokoh PRRI kemudian diberikan sanksi pemerintah. Sjafruddin Prawiranegara kemudian diasingkan ke Jawa Timur. Dalam pengasingan ia meminta untuk menjalani pengasingan di luar negeri tanpa pernah lagi kembali ketanak air. Akan tetapi Soekarno tidak menyetujuinya, dan malah meminta Sjafruddin untuk meminta maaf. Permintaan ini ditolak oleh Sjafruddin, dengan dalih bahwa ia tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Bahkan Sjahrir yang tidak melibatkan dirinya dalam PRRI juga ikut dijebloskan pemerintah ke dalam penjara. Hal ini dialami oleh banyak tokoh-tokoh PRRI, bahkan Ahmad Husein sekalipun. Sedangkan untuk orang PRRI yang disinyalir aktif dalam gerakan anti komunis yang diibawahi oleh Dahlan Djambek, banyak di tumpas oleh pasukan pusat, sehingga pada saat itu banyak ditemukan kuburan masal di wilayah Sumatra Barat.<sup>64</sup>

Untuk perwira menengah kebawah dan prajurit yang terlibat dalam PRRI, mendapat sanksi penurunan pangkat. Menurut edarannya, pangkatnya hanya diturunkan satu tingkat saja, tetapi pada realisasinya, pangkat yang diturunkan bahkan

---

<sup>63</sup> Letkol Purn. Sjoeb dalam artikelnya di Haluan, 13 November 1998 dengan judul janji amnesti dan Abolisi Mungkin Dipakai Nasotion sebagai siasat bagian 5, dan Audrey Kahin (2008), hlm. 356.

<sup>64</sup> Letkol Purn. Sjoeb, ibid.

melebihi dua tingkat. Hal seperti ini dialami oleh Basir A yang sebelum PRRI pangkatnya adalah Sersan Mayor. Pada saat PRRI, pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan. Ketika PRRI selesai, pangkatnya kemudian diturunkan menjadi prajurit Kepala atau PRAKA. Pada masa orde baru ia sudah mencoba mengurus kembali pangkat sebelum PRRI, tetapi tidak pernah berhasil. Hingga hari ini, ia masih menikamati pensiunan dari pemerintah. Hal ini juga terjadi pada anggota PRRI dari kalangan militer lainnya. Mereka mengalami penurunan pangkat bahkan lebih dari dua tingkat.<sup>65</sup>

Selain tokoh-tokoh PRRI dan kalangan militer tersebut, anggota PRRI yang terdiri dari masyarakat sipil atau yang disebut sebagai Tentara Penjara (TP) tampaknya tidak merasakan akibat yang terlalu besar. Anggota TP yang sebelumnya adalah guru, siswa, ataupun mahasiswa diharuskan untuk kembali keaktifitas mereka sebelum PRRI. Akan tetapi menurut informasi di lapangan, setelah tentara PRRI menyerah kalah pemerintah pusat beserta dengan orang komunis setempat melakukan pendataan terhadap masyarakat sipil yang terlibat dalam PRRI. Mereka dikumpulkan di lapangan atau balai desa setempat. Setelah itu mereka akan dipaksa menandatangani sebuah surat pernyataan bahwa mereka bergabung dengan PKI. Apabila menolak untuk bergabung, mereka kemudian diperintahkan untuk kembali ke dalam hutan, untuk kemudian diburu oleh orang PKI dan tentara pusat yang beraliran kiri tersebut. Oleh karena itu mereka dengan terpaksa menandatangani surat pernyataan bahwa mereka bergabung dengan PKI.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Basir A., dan juga informan lainnya.

<sup>66</sup>Hal ini dikemudian hari pasca terjadinya G30S/PKI tahun 1965 membawa akibat buruk bagi mereka. Surat yang mereka tanda tangani tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah untuk

Bagi masyarakat kebanyakan orang-orang yang terlibat dalam perlawanan PRRI ketika kembali lagi menjadi masyarakat biasa setelah PRRI kalah tidak mendapat sanksi sosial apapun. Perlawanan PRRI kalah tidak mendapat sanksi sosial apapun. Perlawanan PRRI dinilai sebagai sebuah perjuangan untuk memperoleh keadilan. Bahkan, tokoh PRRI yang diberikan tempat terhormat di dalam nagari. Apalagi ketika terjadinya gerakan PRRI, tidak hanya militer dan tentara pelajar saja yang terlibat di dalamnya. Dukungan keluarga dan masyarakat bagi pasukan PRRI sangat besar. Bahkan di Bayang pesisir selatan keluarga pasukan seringkali mengunjungi kerabat mereka yang berjuang dihutan sambil membawakan makanan, tembakau, pakaian, atau hanya sekedar melihat keadaan saja.

Setelah habis masa perjuangan PRRI, masyarakat masih belum mengubah pandangan mereka mengenai pemerintah pusat. Kekecewaan akibat ketidakmerataan pembangunan terus berlanjut. Sementara itu orang komunis seolah mendapat kesepakatan untuk menunjukkan dominasinya. Hal ini membuat kebencian masyarakat terhadap Soekarno, PKI dan pemerintah komunis menjadi-jadi. Dominasi PKI pada

---

menyatakan mereka sebagai partisipan PKI. Menurut keterangan Zubir, pada Desember 1965 ia bersama dua truk orang dari kanagarian kubang, Kapencong, dan Koto Barapak diangkut oleh tentara dan dibawa ke Painan. Di Painan mereka juga bertemu dengan teman-teman dari Salio, Kambang dan daerah lainnya. Semua berwajah muram. Menurut cerita mereka telah ada beberapa teman mereka yang dibawa ke Padang dan menurut desas-desus telah ditembak mati. Tidak lama kemudian datang wali nagari Kubang yang merupakan mantan pejuang 45 menemui komandan pasukan di Painan. Setelah itu orang-orang yang baru saja datang dengan dua truk tersebut didata dan dipisahkan, kemudian dimasukkan kembali ke dalam truk, dan diangkut kembali ke Bayang. Menurut wali nagari tersebut, ia menyatakan bahwa ia bersedia menggantikan orang-orang di dua truk tersebut untuk ditahan dan dihukum mati jika terdapat orang komunis di dalamnya. Ia menjelaskan peristiwa pasca PRRI mengenai pemaksaan orang komunis terhadap penduduk Bayang untuk menandatangani surat pernyataan ke anggota PKI. Pada akhirnya Zubir yang pada saat itu menjadi guru di SMP Bayang selamat, dan kembali melanjutkan rutinitas hariannya sebagai huru. Hasil wawancara dengan Zubir pada tanggal 14 Oktober 2015.

akhirnya habis setelah tragedi 1965. Pada saat itu orang-orang yang sudah memendam kebencian kepada PKI melancarkan aksi balas dendam. Apalagi bagi yang anggota keluarganya dibunuh oleh PKI pada masa setelah PRRI menyerah.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan semua informan pada waktu dan tempat yang berbeda.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Gerakan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) adalah gerakan yang muncul akibat kegagalan pemerintah pusat menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi luas di daerah. Ketidakmerataan pembangunan juga menjadi faktor munculnya berbagai gerakan perlawanan di daerah. Gerakan PRRI dimotori oleh kalangan militer yang merasa kecewa kepada pemerintah pusat. Kalangan militer ini kemudian didukung oleh golongan Islam yang tergabung dalam Masjumi dan PSI. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan PRRI berlangsung selama tiga setengah tahun. Berakhir gerakan ini pada tanggal 21 Juni 1961 ketika Ahmad Husein sebagai pemimpin gerakan PRRI menyerah pada pemerintah pusat. Setelah itu, semua tokoh-tokoh yang terlibat dalam PRRI merasakan sanksi dari pemerintah pusat, terutama yang berasal dari kalangan militer. Sedangkan yang berasal dari masyarakat sipil biasa tidak mendapat sanksi yang berarti dari pemerintah pusat.

Hari ini hanya tersisa beberapa orang saja tokoh PRRI yang terlibat langsung pada waktu itu. Mereka yang rata-rata sudah berusia di atas 80 tahun masih mengenang setiap detik peristiwa tersebut. Bagi mereka gerakan PRRI bukanlah sebuah pemberontakan, tetapi sebuah perjuangan. Perjuangan untuk menuntut keadilan bagi masyarakat di luar pulau Jawa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asnan, Gusti. 2003, *Kamus Sejarah Minangkabau*. Pusat pengkajian Islam dan Minangkabau: Gunatama.
- 2006, *Demokrasi, Otonomi, dan Gerakan Daerah*, Padang: Citra Budaya Indonesia.
- Alisjahbana, Takdir. 1957, *Perjuangan untuk Autonomi dan Kedudukan Adat Didalamnya*, Jakarta: Puataka Rakyat.
- Christopher Lloyd. 1993. *The Structure of History*, Oxford: Blackwell.
- Hasril Chaniago dan Khairul Jasmin. 1998, *Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuak Rangkyo Basa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- J. D. Legge. 1961. *Cultural Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration 1950-1960*. Ithaca: Cornell University Press.
- M. C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Nasution. 1992, *Metode penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Syamdani. 2009, *PRRI, Pemberontakan atau Bukan*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Salim, Makmum. 1971, *Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA*. Jakarta: Departemen Pertahanan –Keamanan Pusat Sedjarah ABRI.
- Sartono Kartodirjo. 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sartono Kartodirjo. 1982, *Pemikiran dan Perkembangan Histeografi Indonesia Suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syamdani. 2009, PRRI, *Pemberontakan atau Bukan*, Yogyakarta: Media Presindo.

Zed, Mestika. 1998, *Sumatra Barat di Panggung Sejarah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Zed, Mestika dan Hasril Chaniago. 2001, *Perlawanan Seorang Pejuang: Biografi Kolonel Ahmad Husein*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

### **Makalah dan Koran**

Letkol Sjoeb, *Reuni Eks Divisi Banteng di Padang*, Harian Haluan 10 November 1998.

----- . *Janji Amnesty dan Abolisi Dipakai Nasution Sebagai Siasat*, Harian Haluan 13 November 1998.

----- . *Surat Mohammad Natsir dan Armada Ketujuh Amerika*, Harian Haluan 14 November 1998.

Zed, Mestika *PRRI dalam Prespektif Militer dan Politik Regional* Makalah Seminar 50 Tahun Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 1998.

----- . *PRRI Dalam Konteks Politik*, Harian Haluan 2 Desember 1998.

## SUMBER INFORMAN

1. Nama : Basir A.  
Tempat/tgl lahir : Bayang, tahun 1930.  
Alamat : Kapencong, Bayang Pesisir Selatan.  
Keanggotaan PRRI : Tentara Militer PRRI  
Pangkat Sebelum PRRI : Sersan Mayor  
Pangkat saat PRRI : Letnan dua  
Pangkat sesudah PRRI : Prajurit
2. Nama : Jarijis  
Tempat/tgl lahir : Bayang, tahun 1927  
Alamat : Kubang, Bayang Pesisir Selatan  
Keanggotaan PRRI : Tentara Militer  
Pangkat Sebelum PRRI : Kopral  
Pangkat saat PRRI : -  
Pangkat sesudah PRRI : Kopral
3. Nama : Zubir  
Tempat/tgl lahir : Bayang, 14 Agustus 1935  
Alamat : Lubuk Aur, Bayang Pesisir Selatan  
Keanggotaan PRRI : Tentara Pelajar  
Pangkat Sebelum PRRI : -  
Pangkat saat PRRI : -  
Pangkat sesudah PRRI : -
4. Nama : Kasurin  
Tempat/tgl lahir : Padang tahun 1930  
Alamat : Kalumbuk, Padang  
Keanggotaan PRRI : Tentara Liar.  
Pangkat Sebelum PRRI : -  
Pangkat saat PRRI : -  
Pangkat sesudah PRRI : -
5. Nama : Rusli Marzuki  
Tempat/tgl lahir : Pesisir Selatan, 1940  
Alamat : Indarung, Padang

Keanggotaan PRRI	: Brigade Mobile
Pangkat Sebelum PRRI	: Sersan
Pangkat saat PRRI	: -
Pangkat sesudah PRRI	: Sersan